

Kabupaten Mamasa Telah Menganggarkan Penanganan Pandemi Bagi Dunia Usaha pada RAPBD 2021



Sumber foto: <https://www.radarpena.id/wp-content/uploads/2019/10/rapbd.png>

Radar Sulbar, MAMASA – Tak bisa dipungkiri COVID-19 menyerang semua sektor. Utamanya sektor ekonomi yang ingin segera dipulihkan. Karena itu, Pemkab Mamasa segera menyiapkan anggaran pemulihan bagi dunia usaha.

“Anggaran ini, nantinya akan digunakan penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Utamanya, untuk menjaga dunia usaha pada masing-masing daerah,” jelas Bupati Mamasa, Ramlan

Badawi dalam sidang paripurna penetapan APBD (Anggaran Pendaapatan dan Belanja Daerah) tahun 2021, Senin 23 November.

Menurut Badawi, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 10 Miliar itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 1 yakni penyusunan APBD dengan memprioritaskan tiga hal. Pertama, untuk penanganan kesehatan, kedua penanganan dampak ekonomi, dan terakhir penyedia dana jaring pengaman sosial.

Salah seorang anggota DPRD Mamasa, Yohanis Katatong, meminta supaya anggaran penanganan COVID-19 yang ditetapkan pada APBD tahun 2021 penggunaannya diprioritaskan pada penanggulangan ekonomi akibat dampak korona. Yohanis juga menjelaskan kalau anggaran COVID-19 tahun 2021 terdapat tiga item kegiatan yang dianggarkan. “Baik untuk pencegahan, penanggulangan dan dana jaring pengaman sosial,” ungkap legislator PDIP itu.

Ia, berharap agar anggaran COVID-19 dapat diberikan pada penganggaran penanggulangan ekonomi akibat dampak pandemi korona. Anggaran yang diperuntukkan penanganan COVID-19 di Mamasa, cukup besar. Sekitar Rp 10 miliar lebih.

Sumber:

Mamasa.radarsulbar.co.id, *Anggaran Dampak Pandemi 2021 Sudah Disiapkan*, Selasa, 24 November 2020.

<https://radarsulbar.co.id/anggaran-dampak-pandemi-2021-sudah-disiapkan/>

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 5
Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021: Sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari Middle Income Trap, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Reformasi Pendapatan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi;
- b. *Recovery* dan Reformasi Belanja *Recovery* dan reformasi kebijakan di bidang belanja antara lain:
 - 1) Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju industry 4.0 (*knowledge economy*);
 - 2) Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan sistem kesehatan dan *health security preparedness*; c. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi;
 - 3) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu *quality control* TKDD, mendorong Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan, pendidikan; dan
 - 4) Fokus program prioritas (*zero based*), berorientasi hasil (*result based*), efisiensi dan antisipatif (*automatic stabilizer*).